

## **Menyambung Nyawa Melalui Samudra: Menyibak Ketahanan Nelayan di Tengah Pandemi**

Johanes Nadimjethro

Tercatat memiliki luas lautan sebesar 3,25 juta kilometer persegi serta jumlah pulau sebanyak 17.499, agaknya bukan sebuah kebetulan mengapa Indonesia memiliki julukan sebagai ‘Poros Maritim Dunia.’ Julukan yang dilontarkan dari mulut Presiden Joko Widodo pada pidatonya di *East Asia Summit* ke-9 pada tahun 2014 silam seakan---dan sepertinya memang---memberikan penegasan kepada seluruh dunia dan rakyat Indonesia sendiri mengenai jati diri dari bangsa ini. Tidak hanya itu, hal ini juga serta-merta membantu menyadarkan kita akan potensi yang ada dari sektor maritim nasional, serta bagaimana bangsa Indonesia memaknai samudra biru yang mengelilingi kita. Bahkan jauh sebelum konsep ‘Poros Maritim Dunia’ diutarakan, sejarah telah banyak memberikan catatan dan penekanan mengenai potensi kemaritiman yang seharusnya menjadi ujung tombak unggulan dari apa yang dimiliki Indonesia.

Sebagai contoh adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang sejarawan bernama Anthony Reid. Dalam bukunya yang berjudul *Charting the shape of early modern Southeast Asia*, Reid memaparkan bahwa menyatakan bahwa eksistensi dimensi maritim---dalam hal ini laut---harus dipahami sebagai pemersatu dan penghubung kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, alih-alih tapal batas daratan yang menjadi pemisah dari daratan-daratan tersebut (Reid, 1999). Sejalan dengan Reid, Multama & Lauder juga menekankan bahwa sejak sebelum masuknya kolonialisme, laut telah berperan sebagai penghubung berbagai aktivitas masyarakat kepulauan Nusantara. Mulai dari kedatangan orang Austronesia dari daratan Cina, penyebaran bahasa dan budaya Melayu-Polinesia timur dan barat, hingga pertukaran rempah-rempah di antara jalur perdagangan pelabuhan-pelabuhan Nusantara (Reid, 1999), (R. & Lauder, 2016). Melalui pemaparan ini, kita dapat memahami bahwa sektor maritim telah memainkan peran krusial dalam berbagai aspek perkembangan dan dinamika yang mewarnai sejarah Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh laut dan kepulauan (*archipelagic state*) memberikan dampak sosio-ekonomi yang sangat jelas kepada penduduknya untuk menggantungkan mata pencaharian mereka kepada laut dan sumberdaya yang terkandung didalamnya. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan apabila nelayan menjadi salah satu pilihan profesi bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah-daerah pesisir. Namun dalam konteks ini, agaknya dapat ditemukan sebuah ironi yang cukup mengherankan mengingat kondisi Indonesia sebagai negara maritim, yaitu tingkat kesejahteraan nelayan Indonesia yang jauh dari kata tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta atau sekitar 25,14 persen dari total penduduk miskin Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa 50 persen klaster nelayan di Indonesia masih berada pada tingkat kemiskinan

di akhir tahun 2019. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai pengelolaan sektor maritim Indonesia selama ini. Idealnya, laut dan seluruh sumber daya yang terkandung didalamnya dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan yang merupakan penduduk asli Indonesia. Adapun pemerintah dan kebijakannya, dapat menjadi salah satu sasaran dari tanda tanya besar tersebut.

Mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia sejak awal tahun 2020 juga memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan nelayan. Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsot) memaparkan bahwa nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID-19. Menurut Bamsot, COVID-19 membatasi aktivitas-aktivitas perekonomian demi menurunkan angka kasus positif serta mengurangi risiko kesehatan. Lebih lanjut, hal ini berdampak pada penurunan perputaran permintaan-penawaran (*supply-demand*) (Kholisdinuka, 2020). Spesifiknya dalam konteks nelayan adalah pembatasan aktivitas melaut dan menangkap ikan, serta penutupan/pengurangan jam operasional pasar berikut restoran-restoran kuliner laut yang mengakibatkan para nelayan tidak bisa memasarkan hasil tangkapannya. Singkat cerita, produktivitas dan pendapatan nelayan menjadi berkurang akibat permintaan pasar yang juga menurun.

Berdampaknya pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan nelayan dapat ditemukan pada contoh kasus yang dialami para nelayan di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan pak Sagiman selaku Wakil Ketua Paguyuban Nelayan Banjarejo, diperoleh pengakuan bahwa nelayan sangat terdampak secara ekonomi akibat pemberlakuan sistem karantina dari pemerintah yang bertajuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Sagiman, PPKM berdampak pada penurunan harga jual ikan, yang mana merupakan hasil tangkapan utama para nelayan. Adanya PPKM berikut ketentuan-ketentuannya menyulitkan nelayan untuk melaut serta mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat distribusi ikan serta destinasi wisata yang dapat menjadi sumber penghasilan alternatif. Disamping itu, Sagiman juga mengeluhkan penjaminan kesehatan mereka akibat mereka tidak dapat menggunakan masker saat bekerja karena hal tersebut dapat menyulitkan mereka.

Melaratnya kondisi nelayan yang diperparah oleh pandemi mengarahkan kita pada pertanyaan mengenai peran pemerintah dalam penanganannya. Dalam hal ini, setidaknya kita dapat mengidentifikasi beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu:

- 1) Diperlukannya bantuan sosial langsung bagi nelayan untuk menjamin ketahanan mereka selama pandemi berlangsung,**
- 2) Memberikan solusi untuk menjaga perputaran roda ekonomi maritim yang berdampak langsung bagi kesejahteraan nelayan, dan juga**

### **3) Bertanggung jawab atas penjaminan kondisi kesehatan nelayan sembari memberikan mereka ruang untuk berproduksi.**

Secara konstitusional, pemerintah sudah seharusnya memberikan hal-hal tersebut sesuai dengan kewajiban yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (dimana pemerintah, baik pusat dan daerah, wajib menjamin kebutuhan hidup warganya serta melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit selama masa karantina wilayah). Namun kita juga dapat memahami bahwa hal tersebut belum dapat diimplementasikan secara merata akibat berbagai faktor manajemen pandemi yang tidak begitu baik sedari awal.

Meskipun demikian, kesejahteraan nelayan serta bagaimana dampak pandemi terhadapnya cukup memberikan kita alasan untuk menaruh lebih banyak perhatian pada para nelayan. Dengan berefleksi pada tajuk 'Poros Maritim Dunia' serta konteks historis mengenai kapasitas maritim Indonesia, kita seharusnya dapat memahami bahwa nelayan merupakan salah satu potensi yang wajib untuk diberdayakan dan dikembangkan. Kasus kesejahteraan nelayan ini menjadi pengingat bagi kita akan belum tercapainya pemerataan di Indonesia, serta masih tingginya kesenjangan sosial yang berlaku. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk lebih mengadopsi pendekatan dan cara berpikir yang lebih 'membumi' (*down to earth*) serta *bottom-up* agar dapat memberikan solusi bagi kesejahteraan para nelayan. Adapun beralih pada produk-produk olahan nelayan lokal untuk makanan sehari-hari dapat menjadi salah satunya. Bagaimanapun juga, sejalan dengan Marhaenisme yang menjadi salah satu fondasi Pancasila, kelompok rakyat kecil seperti nelayan tersebutlah yang sebenarnya menjadi penggerak utama bagi roda perekonomian nasional.

#### Referensi

Andryanto, S. D. (2021, July 20). *Apakah UU Keekarantinaan Kesehatan Diterapkan Jika PPKM Darurat Diperpanjang?* Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1485316/apakah-uu-keekarantinaan-kesehatan-diterapkan-jika-ppkm-darurat-diperpanjang>

Kholisdinuka, A. (2020, August 28). *Potensi Kelautan Melimpah, MPR Soroti Tingkat Kesejahteraan Nelayan.* Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-5149966/potensi-kelautan-melimpah-mpr-soroti-tingkat-kesejahteraan-nelayan>

R., M. T., & Lauder, F. A. (2016). Maritime Indonesia and the Archipelagic Outlook: Some reflections from a multidisciplinary perspective on old port cities in Java. *Wacana*, 102-104.

Reid, A. (1999). *Charting the shape of early modern southeast Asia.* Chiang Mai: Silksworm Books.